

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Djarwanto, Ps. 2001. *Pokok – pokok Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama Cetakan Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Munawir. 2001. *Akuntansi Keuangan dan Manajmen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Munawir. 2012. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.
- Pasal 3 ayat 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara dan Fungsi APBD*.

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.*

Peraturan Daerah No. 9 tahun 2016 tentang *struktur organisasi perangkat daerah pemerintah kota Padang Panjang.*

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 tentang *Prinsip Penting dalam Mengelola Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah.*

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang *Manfaat Laporan Realisasi Anggaran.*

Peraturan Walikota Padang Nomor 51 Tahun 2008 tentang *Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Padang Panjang.*

Simanjuntak, P.J. 2001. *Ekonomii Sumber Daya Manusia.* Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sumarjo, H. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.* Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara.*

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang *Pengertian Keuangan Daerah.*

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.

